



DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR
Jl. Urip Sumohardjo No. 8 Makassar 90232
Tlp. (0411) 3620 970 / Fax. (0411) 3620 790
e.mail: dinas.kearsipan@gmail.com



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a circular emblem.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);



30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Makassar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini yakni :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - b. pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022 dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.



BAB III
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN;
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB VII	PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian RKPD Kota Makassar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang akan di bahas dengan DPRD Kota Makassar.
- (2) Hasil pembahasan dengan DPRD Kota Makassar sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan atau kegiatan dan sub kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Makassar melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, maka dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum terakomodir dalam lampiran Peraturan Walikota ini.



- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Juni 2021


WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KEARSIPAN

Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Maccini Makassar 90232
E-mail : dinas.kearsipan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DIN AS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR

Nomor : 026/S.KEP/DK/II/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) huruf b tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa agar penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Tahun 2022 dapat berjalan efektif, serta berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengembangan Negara yang Bersifat Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembarabn Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembarabn Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Dalam Negeri Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
20. Peraturan Daerah kota Makassar nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5)
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 71).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Persiapan penyusunan yaitu mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Tahun 2022
- b. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kearsipan Tahun 2022
- c. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- d. Menyusun Rancangan Akhir Renja Dinas Kearsipan Tahun 2022 sesuai dokumen RKPD Tahun 2022 yang telah ditetapkan;
- e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud diktum KEDUA, kepada Tim dimaksud diktum PERTAMA, diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

a. Ketua		Rp. 700.000,-/Kegiatan
b. Sekretaris		Rp. 650.000,-/Kegiatan
c. Koordinator		Rp. 600.000,-/Kegiatan
d. - Anggota PNS	4 orang	Rp. 475.000,-/Kegiatan
- Narasumber Forum SKPD	3 orang	Rp. 1.000.000,-/Kegiatan
- Narasumber penyusunan Renja	2 orang	Rp. 1.000.000,-/Kegiatan
- Moderator Forum SKPD	1 orang	Rp. 700.000,-/Kegiatan
- Pembawa Acara	1 orang	Rp. 400.000,-/Kegiatan
- Tenaga Non PNS	4 orang	Rp. 400.000,-/Kegiatan

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 05 Februari 2021

PLT. KEPALA DINAS KEARSIPAN
KOTA MAKASSAR



ANDI ARFAN, S.I.P

Pangkat : Pembina

Nip : 19700220 199006 1 001

Tembusan : Yth.

1. Bapak Walikota Makassar di Makassar;
2. Kepala Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 026/S.KEP/DK/II/2021
TANGGAL : 05 Februari 2021
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENJA**
DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar	Ketua
2	Sekretaris Dinas Kearsipan Kota Makassar	Sekretaris
3	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan Dinas Kearsipan Kota Makassar	Koordinator
4	PNS (4) orang	Anggota
5	Narasumber (2) orang	Anggota
6	Tenaga Non PNS (4) orang	Anggota
7	Forum SKPD Narasumber forum SKPD (3) orang Moderator (1) orang Pembawa Acara (1) orang	Narasumber Moderator Pembawa Acara

PLT. KEPALA DINAS KEARSIPAN
KOTA MAKASSAR.



ANDI ARFAN, S.I.P

Pangkat : Pembina

Nip : 19700220 199006 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan Kota Makassar 2022, ini adalah dokumen operasional tahunan pembangunan yang merupakan fase pertama dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2021-2026; sekaligus merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2021-2026. Untuk selanjutnya dokumen Renja ini akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kota Makassar selama Tahun 2022.

Renja tahun 2022 ini memuat substansi pokok tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, review terhadap rencana awal RKPD Tahun 2022, penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat, serta memuat rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2022 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang kearsipan di Kota Makassar akan menjadi lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Makassar, 28 September 2021

Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar



Dr. H. Fathurrahim, S.T., M.T

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700310 199803 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	29
2.3. Isu-isu Penting Pelaksanaan tugas dan Fungsi PD	38
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD	42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan Sasaran Renja SKPD	60
3.3. Program dan Kegiatan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	85
BAB V PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kearsipan Kota Makassar	32
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	44
Tabel 2.5	Kajian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022 Kota Makassar	57
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	69
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022	86

BAB I PENDAHULUAN

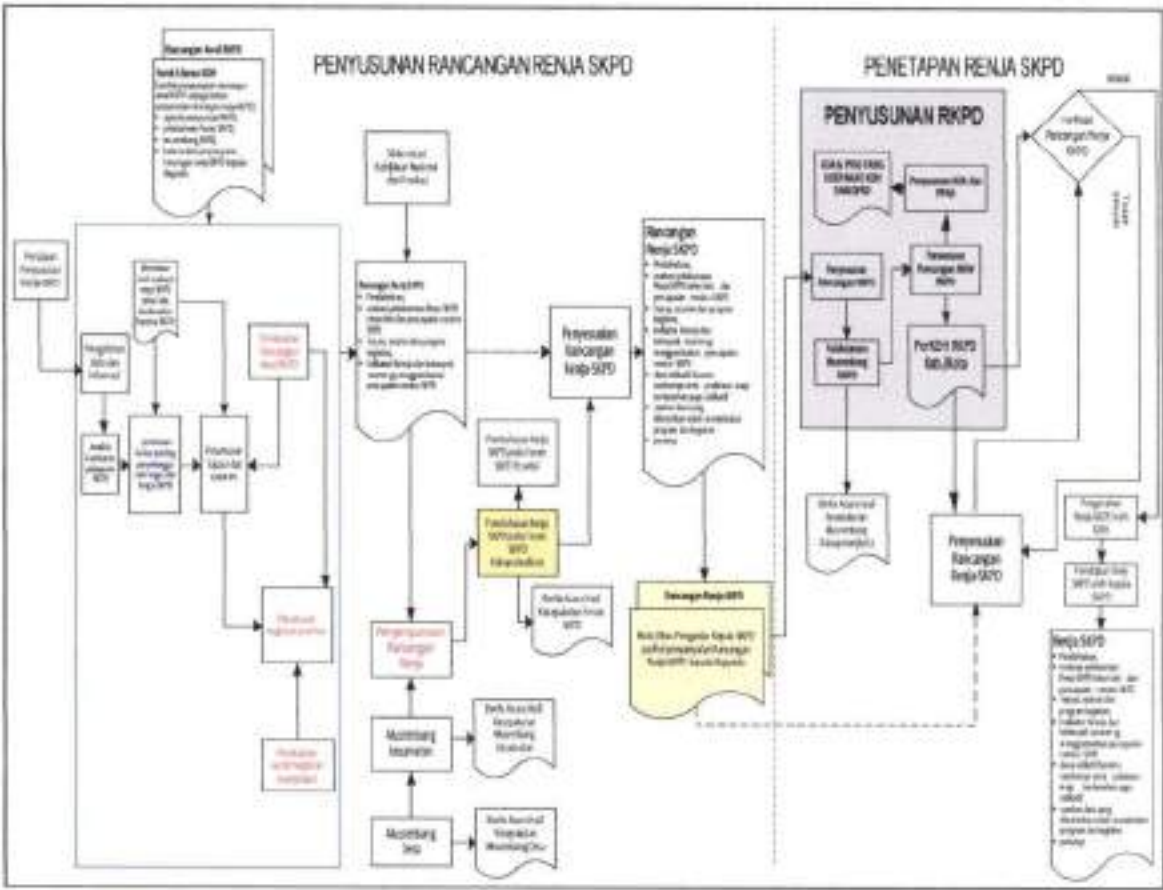
1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Secara jelas, maka tim kerja akan memiliki arahan yang jelas sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Diharapkan pekerjaan akan dapat terlaksana seperti yang telah ditargetkan. Selanjutnya, dengan didokumentasikannya rencana kerja maupun rencana anggaran, akan memudahkan menelusuri akar masalah serta personil yang bertanggung jawab ketika organisasi mengalami persoalan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar diwajibkan membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD), sebagai penjabaran dari RENSTRA SKPD yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan SKPD tahun yang bersangkutan, hal ini merupakan konsekwensi logis dari adanya perubahan paradigma birokrasi pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik sebagaimana diamanahkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan wujud kemandirian daerah dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang berimbas pada kebijakan Daerah di bidang Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Berbasis Informasi dan Teknologi.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political,

Economic, Social, Technological), atau **STEER** (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory). Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 kepada Pemerintah Daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang di susun sebagai jabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bersangkutan. Sebagaimana dikatakan oleh “Bintoro” (1976) bahwa rencana tahunan adalah merupakan penterjemahan tahunan secara lebih kongkrit, spesifik dan operasional rencana jangka menengah. RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersangkutan.



Gambar.G-VI.A.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dinyatakan bahwa rencana

kerja pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rencangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa RKPD ini bukanlah kumpulan dari rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing SKPD (lazim disebut sebagai renja SKPD) sebagaimana yang juga dipersepsikan oleh para aparatur daerah.

RKPD dapat dikatakan sebagai dokumen perencanaan yang sangat praktis dan operasional karena isinya lebih banyak diarahkan pada perumusan program dan kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan. Disamping itu, RKPD juga memuat perkiraan kebutuhan dana untuk masing-masing program dan kegiatan berikut unit atau bagian yang akan mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun bersangkutan. Penyusunan RKPD dimulai dengan menyiapkan rancangan awal oleh Bappeda daerah bersangkutan melalui penjabaran RPJMD setempat dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan mendesak yang terdapat pada tahun bersangkutan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 ini adalah merupakan penjabaran 5 tahun kedepan dari dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan Kota Makassar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Dengan demikian RPJMD merupakan acuan dalam menyusun RENJA SKPD, selanjutnya RENJA SKPD sebagai rujukan membuat RKA/DPA serta sebagai acuan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban Walikota Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) didasarkan Pada Forum Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan dan Renja SKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, Program dan kegiatan SKPD serta dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Makassar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Dinas Kearsipan Kota Makassar, Sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
 22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
 23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
 24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Daerah Kota Makassar Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
 25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 106);
 26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9);
 27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91);
 28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2022 adalah :

- a. Melaksanakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas.
- b. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam tercapainya tujuan pelayanan publik. Dapat mengukur indikator kinerja dan capaian realisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Sedangkan tujuan utama penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) adalah :

- a. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan rencana program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menetapkan rencana program dan kegiatan Tahun 2022 beserta rincian anggaran yang akan digunakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu-isu strategis, usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan dan telaahan terhadap kebijakan nasional;
- c. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kearsipan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah, Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Berisikan membandingkan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tupoksi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Kearsipan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kearsipan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Dalam rangka meningkatkan target kinerja dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2022, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Berikut ini evaluasi pelaksanaan indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Kearsipan Kota Makassar tahun 2020, secara rinci penjelasan realisasi capaian target kinerja, realisasi capaian keuangan sampai tahun 2020 adalah :

Program Utama

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Indikator Kinerja Program Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan diukur dengan jumlah persentase SKPD/UKPD yang menerapkan system arsip baku pada tahun 2020. Target indikator kinerja tahun 2020 sebesar 109 SKPD/UKPD=52% dengan realisasi 109 SKPD/UKPD= 52% dan capaian sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **target tercapai**. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah % SKPD/UKPD yang menerapkan system arsip baku	109 SKPD/UKPD= 52%	109 SKPD/UKPD= 52%	100%

SKPD/UKPD yang Menerapkan System Arsip Baku

No.	SKPD/UKPD	Keterangan
1.	Musium Kota	Indikator Variabel Penerapan System Arsip Baku 1. Menerapkan pola klasifikasi yang telah ditetapkan 2. Ruang penyimpanan arsip /tempat 3. Sarana yang terdiri dari filing cabinet, lemari Arsip, folder. 4. Sumber daya manusia (SDM) mengelola Arsip
2.	Dinas Kelautan /Ketahanan pangan	
3.	Bagian ekonomi dan perdagangan	
4.	Kantor Kesbang	
5.	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	
6.	Dinas Penanggulangan Bencana	
7.	Kel. Maccini Sombala	
8.	Dinas PU	
9.	Bagian Perlengkapan	
10.	Sekda Kota Makassar (2009)	
11.	Kelurahan Bulorokeng	
12.	Kelurahan Tamamau	
13.	Kelurahan Mappala	
14.	Kel. La'Latang	
15.	Kel. Bulurokeng	
16.	Bagian Keuangan (2010)	Data Tahun 2010
17.	Kelurahan Bonto Makkio	
18.	Kelurahan Lette	
19.	Sekretariat DPRD	
20.	Kelurahan Baraya (2011)	
21.	Bagian Ortala	Data Tahun 2011
22.	Kel Kaluku Bodoa	
23.	Kel. Maricaya	
24.	Kel. Mandala	
25.	Asisten I (bidang Pemerintahan)	
26.	Ruang Walikota (2012)	Data Tahun 2012
27.	Sekretariat DPRD	
28.	Kelurahan Tamalanrea Indah	
29.	Kecamatan Wajo	
30.	Kelurahan Ujung Pandang Baru	
31.	Kecamatan Ujung Pandang	Data Tahun 2013
32.	Kecamatan Ujung Tanah	
33.	Kelurahan Mamajang Luar (2013)	

34.	Dinas Perindustrian Dan PM	Data Tahun 2014
35.	Kelurahan Bara-Baraya	
36.	Kelurahan Karang Anyar	
37.	Kel. Baji Mappasungguh (2014)	
38.	Kelurahan Gusung	
39.	Kelurahan Baru	
40.	Kelurahan Buakana	
41.	Kelurahan Parang Tambung	
42.	Kel. Walawalaya, Kec Tallo	
43.	Kel. Jongaya	
44.	Kel. Maloku	
45.	Kel. Masale	
46.	Kelurahan Pampang (2015)	Data Tahun 2015
47.	Bagian Hukum	
48.	Kelurahan Pai	
49.	Kelurahan Pannanpu	
50.	Kel.Losari	
51.	Kelurahan Merdekaya Utara	
52.	Kelurahan Mangkura	
53.	Dinas Tata Ruang	
54.	Kelurahan Borong	
55.	Kelurahan Rapocini	
56.	Kelurahan Melayu Baru	
57.	Kelurahan Matoangin	
58.	Puskesmas Antang (2016)	Data Tahun 2016
59.	Kelurahan Bungaya	
60.	Kelurahan Maccini parang	
61.	Kelurahan Antang	
62.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	
63.	Kelurahan Bontoala Parang	
64.	Kelurahan Daya	
65.	SMP Negeri 23 Makassar	
66.	Kelurahan Mangasa	
67.	Kelurahan Balla Parang	
68.	Kelurahhan Butung	

69.	Kelurahan Pisang Selatan	Data Tahun 2017
70.	Kelurahan Tamarunang (2017)	
71.	Dinas Koperasi	
72.	Kelurahan Kalukuang	
73.	Kelurahan La'latang	
74.	Kelurahan Tanjung Merdeka	
75.	Kec. Bontoala	
76.	Kelurahan Ende	
77.	Kecamatan Tamalate	
78.	Bagian Pemberdayaan Masyarakat	
79.	Kelurahan Lariangbanggi	Data Tahun 2018
80.	Kecamatan Mamajang	
81.	Kelurahan Katimbang	
82.	Kec. Tallo (Tahun 2018)	
83.	Kec. Panakukang	
84.	Tata Pemerintahan	
85.	Kec. Mariso	
86.	Dinas Perizinan	
87.	Dinas Perdagangan	
88.	Kel. Manggala	
89.	Kel. Sambung Jawa	Data Tahun 2019
90.	Kel. Banta-Bantaeng	
91.	Kel. Bontorannu	
92.	Kel. Maricaya Selatan	
93.	Kel. Malimongan	
94.	Kel. Sawerigading (Tahun 2019)	
95.	Kel. Tidung	
96.	Dinas Ketahanan Pangan	
97.	Dinas Perhubungan	
98.	Kel. Kanrurung	
99.	Dinas Perumahan	
100.	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	
101.	Kec. Biringkanaya	
102.	Dinas Pemberdayaan Perempuan	
103.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	

104.	Dinas Pariwisata	Data Tahun 2020
105.	Dinas Perumahan	
106.	Dinas Pemadam Kebakaran (2020)	
107.	Bagian Perekonomian & Kerjasama	
108.	Kel. Tamparang Keke	
109.	Kel. Macini Gusung	

Adapun Faktor Pendorong :

1. Antusiasnya setiap SKPD/UKPD yang ingin merawat dan menata arsip yang diciptakannya sesuai dengan ketentuan dan pedoman kearsipan yang berlaku;
2. Tingkat kepedulian para pengelola arsip di SKPD/UKPD akan tertib arsip semakin meningkat;
3. Adanya kegiatan workshop dan bimbingan teknis kearsipan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip yang diciptakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman kearsipan.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan dan disediakan oleh SKPD/UKPD untuk merawat dan menata arsipnya. Sarana tersebut berupa filling cabinet, dos arsip dan lemari arsip, sedangkan prasarananya berupa ruang tempat penyimpanan arsip yang telah dirawat dan ditata (record center arsip);
2. Kurangnya tenaga fungsional arsiparis di setiap SKPD/UKPD yang dapat secara totalitas merawat dan menata arsip-arsip yang telah diciptakan;
3. Tidak adanya penetapan pengawal pengelola kearsipan di setiap SKPD/UKPD untuk membantu dalam merawat dan menata arsipnya.

Tindak Lanjut :

1. Menyarankan kepada setiap SKPD/UKPD untuk menganggarkan sarana pendukung pengelolaan kearsipan di masing-masing SKPD/UKPD, Lembaga Kearsipan dalam hal ini Dinas Kearsipan memberikan bantuan secukupnya terkait sarana tersebut kepada SKPD/UKPD dalam merawat dan menata arsipnya, menyarankan ke SKPD/UKPD untuk menyiapkan ruang khusus untuk penyimpanan arsipnya;
2. Memberikan motivasi melalui workshop maupun bimbingan teknis kepada setiap pengelola kearsipan di SKPD/UKPD untuk menjadi seorang Arsiparis

yang memegang peranan penting dalam menerapkan pengelolaan arsip secara baik dan benar;

3. Menyarankan kepada setiap pimpinan SKPD/UKPD untuk memberikan penetapan kepada pegawai pengelola kearsipan agar dapat berkonsentrasi dalam menata arsipnya dan pengelola kearsipan tersebut agar tidak senantiasa berganti-ganti.

Pelaksanaan pencapaian target kinerja program perbaikan system administrasi kearsipan di dukung oleh kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan pemeliharaan arsip SKPD;
- b. Bimbingan teknis pengelolaan arsip;

Pencapaian target indikator kinerja program perbaikan system administrasi kearsipan didukung dengan alokasi pagu anggaran sebesar 156.390.000 dengan realisasi sebesar 142.809.000 atau 91,31%. Dengan realisasi anggaran 91,31% penggunaan sumber daya diatas telah digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk penjelasan target dan realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja tahun 2020 pada kegiatan-kegiatan dapat dilihat pada table 2.1

2. Program Penataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Indikator Kinerja Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah diukur dengan persentase kenaikan jumlah arsip yang diakusisi pada Tahun 2020. Target indikator kinerja tahun 2020 sebesar 10% (100 Box) dengan realisasi 11,7% (117 Box).Dapat dilihat pada table di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kenaikan jumlah arsip yang diakusisi	10%	11,7%	117%

Untuk Indikator Kinerja persentase kenaikan jumlah arsip yang diakusisi untuk tahun 2020 di targetkan 10% (100 Box) dan terealisasi 11,7% (117 Box).

Berikut data pendukung pencapaian indikator kinerja jumlah arsip yang diakusisi :

Jumlah dokumen/arsip daerah yang diakusisi

No.	Nama Instansi	Jumlah Box	Ket.
1.	Kelurahan Rappojawa	18 Box	
2.	Kelurahan Untia	14 Box	
3.	Kelurahan Bangkala	55 Box	
4.	Kelurahan Rappocini	17 Box	
5.	Kelurahan Maccini	13 Box	
	TOTAL	117 Box	

Adapun Faktor Pendorong :

1. Adanya tenaga Fungsional Arsiparis;
2. Meningkatnya kesadaran SKPD/UKPD tentang pengelolaan dan pelestarian arsip;
3. Adanya kegiatan perawatan dan pengamanan arsip sehingga arsip yang ada dapat tetap terpelihara.

Faktor Penghambat :

1. Belum adanya tempat penyimpanan arsip (Depo) yang representatif dan memadai sehingga belum semua arsip Pemerintah Kota Makassar dapat kami lestarikan pada Dinas Kearsipan Kota Makassar dan masih disimpan SKPD masing-masing;
2. Masih adanya SKPD yang masih enggan untuk ditatakan dan diberikan pembinaan;
3. Belum adanya tenaga Arsiparis di tiap SKPD.

Tindak Lanjut :

1. Membuat telaahan staf kepada Walikota untuk dibangun DEPO dan Kantor Dinas Kearsipan Kota Makassar;
2. Adanyaa sayembara yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Makassar untuk perencanaan Pembangunan Gedung DEPO Arsip dan Kantor Dinas Kearsipan Pemerintah Kota Makassar;
3. Memberikan pemahaman pada setiap SKPD melalui kegiatan BIMTEK maupun sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban daerah;
4. Memberikan motivasi pada setiap SKPD untuk menjadi Fungsional Arsiparis dengan mengikuti program inpassing dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pelaksanaan pencapaian target kinerja program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah di dukung oleh kegiatan yaitu :

1. Pendataan dan penataan arsip daerah (akusisi arsip);
2. Perawatan dan pengamanan arsip depot;
3. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;

Pencapaian target indikator kinerja program perbaikan system administrasi kearsipan didukung dengan alokasi pagu anggaran sebesar 212.029.000 dengan realisasi sebesar 153.917.000 atau 72,59%. Dengan realisasi anggaran 72,59% penggunaan sumber daya diatas telah digunakan secara efektif dan efisien.

Program Penunjang/Pendukung

Program Penunjang/Pendukung yang terdiri dari 3 program dan leding sektor atau unit penanggungjawab ada pada Sekretariat Dinas Kearsipan Kota Makassar, sebagaimana program tersebut dengan tujuan dasar pada pelayanan administrasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur, dan pengelolaan keuangan yang terdiri dari program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki 2 tareget indikator kinerja yaitu : Indeks kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah, dan persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100%	98%	98%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasistas	100%	100%	100%
Persetase capaian rata-rata			99%

Untuk indikator kinerja indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di tahun 2020 ditargetkan 100% dan realisasi 98% atau capaian 98%, sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Dinas Kearsipan Kota Makassar, selanjutnya pegawai menilai dan mengukur kualitas pelayanan administrasi perkantoran. Dari jumlah pegawai Dinas Kearsipan Kota Makassar sebanyak 42 orang yang tidak puas 1 orang dan yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 41 orang atau 98%.

Sedangkan Indikator kinerja persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas di tahun 2020 ditargetkan 14 orang tetapi karena adanya refocussing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 sehingga target berubah menjadi 5 orang. Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dibagi dengan target di kali 100. Pada tahun 2020 yang mengikuti pendidikan 5 orang dari target 5 orang di kali 100 dengan realisasi 100%. Target cakupan aparatur yang mendapat pelatihan kompeten di bidangnya tercapai di karenakan di ikutkannya 4 orang untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan dan 1 orang mengikuti diklat fungsional arsiparis

Langkah-langkah strategis ke depan untuk meningkatkan kinerja indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- Melakukan perubahan pola pikir dari petugas yang berkuasa menjadi petugas yang harus melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap arogan
- Komitmen dari pimpinan sampai tingkat bawah untuk melayani
- Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan perlu ditumbuhkan untuk pelayanan.
- Perlunya memberikan penghargaan terhadap petugas yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

Langkah-langkah strategis ke depan untuk meningkatkan kinerja persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas adalah:

- Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan pegawai dalam memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi;
- Pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat teknis dan diklat kepemimpinan;
- Alokasi dana yang dianggarkan untuk pendidikan, pelatihan dan diklat.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya;
- e. Penyediaan bahan bacaan;
- f. Pengelolaan administrasi perkantoran;
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- h. Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan.
- i. Pendidikan dan pelatihan formal

Pencapaian target indikator kinerja program pelayanan administrasi perkantoran didukung dengan alokasi pagu anggaran sebesar 844.247.500 dengan realisasi sebesar 720.510.433 atau 85,34%. Dengan realisasi anggaran 85,34% penggunaan sumber daya diatas telah digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk rincian target dan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tahun 2020 pada kegiatan-kegiatan dapat dilihat pada table 2.1

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki 3 target kinerja untuk tahun 2020 yaitu Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah, persentase sarana dan prasarana aparatur Perangkat daerah dalam kondisi baik, dan persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN Perangkat Daerah. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah	90%	88%	98%
Persentase sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	86%	95%
Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Persentase Capaian Rata-rata			98%

Untuk indikator kinerja indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah tahun 2020 ditargetkan 90% dan realisasi 88% atau capaian 98%, sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Pengukuran indeks kepuasan pegawai terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Dinas Kearsipan Kota Makassar, selanjutnya pegawai menilai dan mengukur kualitas pelayanansarana dan prasarana aparatur. Dari jumlah pegawai Dinas Kearsipan Kota Makassar sebanyak 42 orang yang tidak puas 5 orang dan yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 37 orang atau 88% dengan capaian sebesar 98%. Untuk indikator Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik untuk tahun 2020 di targetkan 90% dari 245 sarana dan prasarana aparatur, adapun sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik 210 jadi realisasi persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik adalah 86% dengan capaian sebesar 95%

Sedangkan Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN Perangkat Daerah pada tahun 2020 dengan target sebesar 100% dan realisasi 100% dan capaian sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **target tercapai**. Berdasarkan data tahun 2020 jumlah pegawai Dinas Kearsipan Kota Makassar

sebanyak 42 dengan realisasi 42 orang yang mendapatkan pakaian dinas atau dengan capaian sebesar 100%

Langkah-langkah strategis ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah :

- Pimpinan disarankan untuk dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam hal perpakaian sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan, dengan demikian akan meminimalisasikan terjadinya tindakan yang pelanggaran aturan (indisipliner);
- Mengefektifkan tindakan disiplin dalam berpakaian dengan cara mensosialisasikan peraturan-peraturan disiplin pegawai kepada para bawahan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kedisiplinan itu dapat tercipta dengan baik;
- Hukuman ringan bagi pegawai yang tidak berpakaian rapi berupa teguran lisan dan teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- Hukuman sedang meliputi penundaan KGB, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat sampai hukuman berat sampai pemecatan.
- Pemberian reward dan funishment termasuk untuk promosi dan rotasi pegawai. Dengan demikian, peraturan pemerintah tersebut menunjang dan mendukung upaya pengembangan manajemen kepegawaian berbasis kinerja;
- Memotivasi sebagai daya dorong bagi pegawai untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program peningkatan sarana dan prasarana adalah :

- a. Pengadaan alat kantor
- b. Pengadaan alat rumah tangga
- c. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- d. Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
- f. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
- g. Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Pencapaian target indikator kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur didukung dengan alokasi pagu anggaran sebesar 256.539.103 dengan realisasi sebesar 215.648.740 atau 84,06%. Dengan realisasi anggaran 84,06% penggunaan sumber daya diatas telah digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk rincian target dan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tahun 2020 pada kegiatan-kegiatan dapat dilihat pada table 2.1

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di ukur dengan Cakupan ketersediaan laporan keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2020. Target indikator kinerja Cakupan ketersediaan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian 100%, sehingga dapat dikategorikan target tercapai. Dimana target laporan keuangan 12 Bulan dan relaisasi 12 laporan maka realisasi 100%. Dapat dilihat pada table di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan ketersediaan laporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah : Pengelolaan Keuangan SKPD

Pencapaian target indikator kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan didukung dengan alokasi pagu anggaran sebesar 21.000.000 dengan realisasi sebesar 21.000.000 atau 100%. Dengan realisasi anggaran 100% penggunaan sumber daya diatas telah digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk rincian target dan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tahun 2020 pada kegiatan-kegiatan dapat dilihat pada table 2.1

Dari 5 (lima) program Rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Kota Makassar memiliki 6 target kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 98,5% atau dengan kriteria penilaian Sangat Baik.

Faktor-faktor penyebab tercapai tidaknya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Faktor-faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja.

Program perbaikan system administrasi kearsipan, program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, program pelayanan administrasi perkantoran program peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan disiplin aparatur dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang telah mencapai target 95% sampai lebih dari 100% hal ini disebabkan oleh : perencanaan kinerja yang diperhitungkan secara matang, sehingga target kinerja dapat dicapai

sesuai dengan harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Kota Makassar adalah : adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia yang komitmen terhadap tugas yang diembankan kepadanya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan Kota Makassar.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut adalah:

- Permasalahan yang terjadi dapat diatasi tergantung kepada besarnya alokasi dana yang disediakan, apabila alokasi dana tersedia kegiatan akan dilaksanakan dengan baik;
- Monitoring, evaluasi dan pembinaan akan dilaksanakan di Dinas Kearsipan Kota Makassar dengan jadwal tersendiri.

Untuk rincian target dan realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja tahun 2020 sampai tahun berjalan pada kegiatan-kegiatan dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel.2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)
Kota Makassar

Nama
SKPD : Dinas Kearsipan Kota Makassar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 - 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1										
1	24									
1	24	01								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	96	100	98	98	100	98
1	24	01	01							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat yang dapat di distribusikan oleh caraka	2.675 Surat	2594	625	627	100	100	3.321 124
1	24	01	02							
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Yang Dibayarkan (Listrik, Telepon dan Sewa Bandwidth)	2 Jenis Tagihan	2	1	1	100	1	2 100
1	24	01	03							
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan % Capaian Kebersihan	10 Orang	8	2	2	100	2	12 120
1	24	01	04							
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Kontrak	105 Orang	85	16	15	94	14	114 108
1	24	01	05							
		Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Media Surat kabot/Majalah	52 Media Cetak	41	4	4	100	2	45 86

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

1	24	01	06	Pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah Kebutuhan Bahan Administrasi Perkantoran	3	Jenis Belanja	3	3	3	100	3	3	100
1	24	01	07	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase dan Jumlah Koordinasi/Konsultasi	279	Kali	190	32	32	100	6	228	83
1	24	01	08	Sosialisasi kinerja pelayanan publik	Jumlah Capaian Kinerja Publikasi Pelayanan Publik	17	Media	12	2	2	100	0	14	82
1	24	01	09	Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Asuransi Ketenagakerjaan	44	Orang	36	16	15	94	14	65	147
1	24	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100	100	100	100	100	100	100
1	24	02	14	Pengadaan alat kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Kantor	25	Jenis Pengadaan	15	1	1	100	2	18	69
1	24	02	15	Pengadaan alat rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	41	buah	11	0	0	0	1	12	29
1	24	02	16	Pengadaan komputer	Jumlah Jenis Pengadaan Komputer dan Peralatan	5	Jenis Pengadaan	8	4	4	100	0	12	240
1	24	02	17	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah Jenis Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	128	Buah	96	2	2	100	0	98	77
1	24	02	18	Pengadaan alat studio	Jumlah jenis pengadaan alat studio	21	Unit	5	1	1	100	0	6	29
1	24	02	19	Pengadaan alat komunikasi	Jumlah pengadaan alat komunikasi	16	Buah	0	0	0	0	0	0	0
1	24	02	34	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	5	Unit	4	1	1	100	1	5	100
1	24	02	35	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	19	Unit Mobil	14	4	4	100	4	22	116
						59	Unit Motor	48	12	11	92	12	71	120
1	24	02	36	Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor	Jumlah pemeliharaan alat kantor	120	buah	100	0	0	0	0	100	83
1	24	02	46	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga	6	Jenis	4	2	2	100	1	7	117

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

1	24	02	47	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah komputer/printer yang dipelihara	61 Unit	49	10	10	100	4	63	103
1	24	02	48	Pemeliharaan rutin/berkala meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah pemeliharaan meja dan kursi kerja/rapat	17 unit	17	0	0	0	0	17	100
1	24	02	49	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio	Jumlah pemeliharaan alat studio	4 Jenis	0	0	0	0	0	0	0
1	24	02	50	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	Jumlah pemeliharaan gedung tempat kerja	8 Jenis	4	0	0	0	0	0	50
1	24	02	67	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah perizinan/pajak kendaraan dinas/operasional	4 Unit Mobil	3	4	4	100	4	5	125
						12 Unit Motor	9	12	11	92	12	13	108
1	24	02	68	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8 Komponen Peralatan	7	7	7	100	4	9	112
1	24	02	74	Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah pengadaan aplikasi SIM	6 Aplikasi	2	0	0	0	0	2	33
1	24	02	75	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah pemeliharaan aplikasi SIM	2 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0
1	24	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan pakaian dinas pegawai	100%	90	100	100	100	100	98	98
1	24	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Seragam Pegawai	273 Stel/Pasang	225	43	43	100	46	314	115
1	24	04		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya	100%	93	100	26	26	100	93	93
1	24	04	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai Dinas Keasipan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	62 Orang	38	19	5	26	0	43	69

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

1	24	05		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah	100%	84	100	95	95	100	100	100
1	24	05	01	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan dan Pokok)	10 Dokumen	8	2	2	100	2	12	120
1	24	05	02	Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (Pokok dan Perubahan)	10 Dokumen	8	2	2	100	2	12	120
1	24	05	03	Penyusunan RENJA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan	5 Dokumen	4	1	1	100	1	6	120
1	24	05	04	Penyusunan LAKIP-SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP Dinas Kearsipan	5 Dokumen	4	1	1	100	1	6	120
1	24	05	05	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja dinas Kearsipan	5 Dokumen	4	1	1	100	1	6	120
1	24	05	06	Penyusunan RENSTRA-SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA	2 Dokumen	1	0	0	0	1	2	100
1	24	05	07	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 Dokumen	8	2	2	100	2	12	120
1	24	05	08	Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah Pengelolaan Keuangan SKPD	72 Orang	56	14	14	100	14	84	117
1	24	05	09	Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	Jumlah Pelayanan Administrasi dan Konsultasi	5 Tahun	4	1	1	100	0	5	100
1	24	05	10	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen indeks kepuasan masyarakat	3 dokumen	0	0	0	0	0	0	0
1	24	06		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah % SKPD yang menerapkan sistem arsip baku	105 SKPD/UKPD	105	4	4	109	8	117	111
1	24	06	01	Pembinaan/Pemeliharaan Arsip Kelurahan	Jumlah kelurahan binaan	49 kelurahan	37	12	12	100	0	49	100
1	24	06	02	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah dokumen kajian khasanah Arsip In Aktif dan Arsip Statis	6 Dokumen	4	2	2	100	0	6	100

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

1	24	06	03	Sosialisasi Manajemen Arsip Statis SKPD, Kelurahan, PKM dan Sekolah	Jumlah peserta sosialisasi manajemen arsip statis SKPD, Kelurahan, PKM dan Sekolah	1500 orang	1200	200	200	100	100	1.500	100
1	24	06	04	Sosialisasi Kearsipan Pada Ormas/Parpol/ dan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kearsipan ormas/parpol/masyarakat	450 orang	300	150	150	100	0	450	100
1	24	06	05	Lomba Penataan Kearsipan Pada SKPD / Unit Kerja	Jumlah SKPD/Unit kerja yang mengikuti lomba	135 SKPD/UKPD	87	51	51	100	0	138	102
1	24	06	06	Penyuluhan dan Bimtek Pengelolaan Arsip	Jumlah peserta penyuluhan dan bimtek pengelolaan arsip	2160 orang	1730	480	480	100	120	2330	108
1	24	06	07	Pameran Kearsipan	Jumlah keikutsertaan pada pameran kearsipan	5 Pameran	1	1	1	100	0	5	100
						10 Keikutsertaan	8	2	2	100	1	11	110
1	24	06	08	Pembinaan/Pemeliharaan Arsip SKPD	Jumlah SKPD binaan	36 SKPD	36	3	3	100	8	47	130
1	24	06	09	Bimtek pengelolaan arsip dinamis untuk SKPD	Jumlah peserta bimtek pengolahan Arsip Dinamis SKPD/UKPD	200 orang	200	0	0	0	0	200	100
1	24	06	10	Workshop pelestarian arsip	Jumlah peserta work shop pelestarian arsip	700 orang	700	200	200	100	0	900	129
1	24	06	11	Workshop arsip dinamis	Jumlah peserta workshop dinamis	700 orang	500	200	200	100	100	800	114
1	24	06	12	Workshop arsip statis	Jumlah peserta workshop statis	600 orang	400	200	200	100	0	600	100
1	24	06	13	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif / Substantif	Jumlah dokumen JRA Fasilitatif/ substantif	6 dokumen JRA F Fasilitatif	3	3	3	100	0	6	100
1	24	06	14	Bimtek Pengelolaan Arsip	Jumlah peserta bimtek pengelolaan arsip	400 orang	400	200	200	100	0	400	100
1	24	07		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	- Jumlah Dokumen/arsip daerah yang diselamatkan	3.657 Box	3.188	500	718	144	75	3.981	109
					- Jumlah dokumen/arsip daerah yang dilestarikan	2.312 Box	1540	772	772	100	192	2.504	108
1	24	07	01	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah (Akuisisi Arsip)	Jumlah SKPD/UKPD yang ditata	53 SKPD/UKPD	40	12	12	100	5	59	111

1	24	07	02	Perawatan dan Pengamanan Arsip Depo	Pengelolaan arsip in aktif dan statis	48 Kegiatan	36	12	12	100	3	51	106
1	24	07	03	Penyusunan Naskah / Dokumen Arsip dan Penjilidannya	Jumlah naskah/dokumen arsip	100 Dokumen Arsip	90	20	20	100	10	110	110
1	24	07	04	Penilaian dan Pemusnahan Arsip	Jumlah pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip	10 Kegiatan	8	2	2	100	1	11	110
1	24	07	05	Pengadaan Buku Pedoman Penataan Arsip	Jumlah buku pedoman penataan arsip	1250 buku	750	250	250	100	0	1.250	100
1	24	07	06	Pengelolaan Sistem Kearsipan secara Elektronik (e-Filing)	Jumlah arsip yang telah di Elektronikan	1275 Box	975	300	300	100	0	1.275	100
1	24	07	07	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	44 kegiatan	32	12	12	100	0	44	100
1	24	07	08	Alih Media Arsip Konvensional Foto ke Media Elektronik (Cakram Padat)	Jumlah arsip yang dicompers	6000 data	4.201	2.000	2.000	100	500	6.201	103
1	24	07	09	Penelusuran Arsip Sejarah Kota Makassar	Jumlah dokumen/ arsip sejarah yang diselamatkan	10 dokumen	6	5	6	120	0	11	110
1	24	07	10	Penyediaan Data Informasi E-Profil Kota Makassar	Pembuatan Informasi E- Profil Kota Makassar	350 Keping CD	375	0	0	0	0	250	71

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Dinas Kearsipan Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah. Dalam melakukan tugas pokok yang dimaksud juga menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang kearsipan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai lembaga teknis daerah di bidang Kearsipan tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh sebab itu Analisi kinerja pelayanan Dinas Kearsipan kota Makassar menggunakan beberapa indikator antara lain Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau indikator berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan indikator kinerja Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan sasaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Dinas Kearsipan dalam meningkatkan pelayanan menetapkan indikator kinerja terdapat pada tabel di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja Dinas Kearsipan
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional

2.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
3.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
5.	Persentase perijinan penggunaan arsip yang diterbitkan

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk Urusan Kearsipan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar namun sampai saat ini belum ada indikator urusan Kearsipan yang ditetapkan dalam bentuk SPM. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selain melaksanakan tugas administrasi perkantoran, Dinas Kearsipan Kota Makassar juga dapat memberikan layanan lain seperti :

1. Pelayanan Akusisi dari SKPD dilingkungan instansi swasta/ pemerintah Kota Makassar.

Akusisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

2. Pelayanan Informasi Kearsipan

Lembaga kearsipan menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi, dan bimbingan bagi pengelolaan arsip masyarakat.

3. Pelayanan Sosialisasi Kearsipan

- Lembaga kearsipan menggiatkan sosialisasi kearsipan dalam mewujudkan masyarakat sadar arsip
- Sosialisasi kearsipan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, bimbingan dan penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi
- Sosialisasi kearsipan ditujukan pada lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perseorangan

4. Layanan Pengelolaan Arsip

Pengelolaan Arsip

- Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:
 - a. andal;
 - b. sistematis
 - c. utuh;
 - d. menyeluruh; dan
 - e. sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
- Pengelolaan arsip dinamis meliputi:
 - a. Penciptaan arsip;
 - b. Penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
 - c. Penyusutan arsip
- Pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
- Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA), serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
- Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.

5. Pelayanan Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.

- Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;
- Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip; dan
- Penyusutan arsip yang dilaksanakan dengan memperhatikan kegiatan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

Penyusutan arsip meliputi :

- Pemindahan arsip inaktif dari unit kearsipan;
- Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dengan peraturan pemerintah.

Berikut Tabel. 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan
Kota Makassar

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD		Target Renja		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A												
1	Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawain, Perlengkapan dan Keuangan)				90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan				90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	
2	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

6	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat yang disusun			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
1	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan			27 Orang	28 Orang	32 Orang	36 Orang	27 Orang	29 Orang	32 Orang	36 Orang	
2	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan			14 Orang	14 Orang	14 Orang	15 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	15 Orang	
3	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
4	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD yang disusun			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	
1	Jumlah pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan			43 Stel	43 Orang	46 Stel	50 Stel	43 Stel	43 Orang	46 Stel	50 Stel	
	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			5 Orang			17 Orang	5 Orang			17 Orang	
	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			7 Komponen	7 Komponen	4 Komponen	4 Komponen	7 Komponen	7 Komponen	4 Komponen	4 Komponen	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			3 Jenis	3 Jenis		4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis		4 Jenis	
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				1 Unit		9 Jenis		1 Unit		9 Jenis	
	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan						3 Jenis				3 Jenis	
2	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1 Jenis	2 Jenis	1 Tahun	4 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Tahun	4 Jenis	
	Jumlah tamu yang mendapatkan fasilitas					120 Orang	120 Orang			120 Orang	120 Orang	
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan			32 Kali	25 Kali	6 Kali	11 Kali	15 Kali	12 Kali	6 Kali	11 Kali	

Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan			13 Unit	7 Unit	2 Unit	9 Unit	13 Unit		2 Unit	9 Unit	
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			13 Unit	7 Unit	2 Unit	8 Unit	13 Unit		2 Unit	8 Unit	
Jumlah aset tak berwujud yang diadakan						1 Aplikasi				1 Aplikasi	
Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan pemeliharaan			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	
Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan yang disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			5 Unit Mobil, 12 Motor	4 Unit Mobil dan 12 Unit Motor	4 Unit Mobil dan 12 Unit Motor	4 Unit Mobil dan 13 Unit Motor	5 Unit Mobil, 12 Motor	4 Unit Mobil dan 12 Unit Motor	4 Unit Mobil dan 12 Unit Motor	4 Unit Mobil dan 13 Unit Motor	
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan			39 Unit	36 Unit	31 Unit	31 Unit	39 Unit	36 Unit	31 Unit	31 Unit	
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi						500 m2/Tahun				500 m2/Tahun	
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional					5221 (69% 4820 arsip dinamis)	5076 (74,1%)			5221 (69% 4820 arsip dinamis)	5076 (74,1%)	
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku			50%	54%	50,98% (26 SKPD)	60,78% (31 SKPD)	50%	52%	50,98% (26 SKPD)	60,78% (31 SKPD)	
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan					21 Orang	31 Orang			21 Orang	31 Orang	
Jumlah arsip Kota Makassar yang dikelola			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	
						1 Kegiatan				1 Kegiatan	

					12 SKPD/UKPD	8 SKPD/UKPD	5 SKPD		3 SKPD/UKPD	8 SKPD/UKPD	5 SKPD	
1	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan digunakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	
2	Jumlah Arsip Dinamis yang mendapat pemeliharaan dan penyusutan				12 SKPD/UKPD	8 SKPD/UKPD	1 Kegiatan		3 SKPD/UKPD	8 SKPD/UKPD	1 Kegiatan	
3	Jumlah SKPD yang diawasi						5 SKPD				5 SKPD	
	Jumlah Arsip Statis Kota Makassar yang dikelola				12 SKPD/UKPD	8 SKPD/UKPD	2 Dokumen dan 150 Box		3 SKPD/UKPD	8 SKPD/UKPD	2 Dokumen dan 150 Box	
1	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI						2 Dokumen				2 Dokumen	
2	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses				12 SKPD/UKPD	8 SKPD/UKPD	150 Box		3 SKPD/UKPD	8 SKPD/UKPD	150 Box	
	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar yang dikelola						2 Dokumen dan 2 SKPD				2 Dokumen dan 2 SKPD	
1	Jumlah Layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN yang mendapat Penyediaan Informasi dan Akses						2 Dokumen				2 Dokumen	
2	Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas						2 SKPD				2 SKPD	
3	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat					1141 (Box Arsip Statis)	1151 (Box Arsip Statis)	100%	100%	1141 (Box Arsip Statis)	1151 (Box Arsip Statis)	
	Jumlah Arsip Dilindungi Pemerintah Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan						102 Dokumen				102 Dokumen	
1	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang mendapat penilaian dan pemusnahan						51 Dokumen				51 Dokumen	
2	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dilaksanakan						51 Dokumen				51 Dokumen	
	Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana						10 Dokumen				10 Dokumen	

1	Jumlah Arsip yang dievaluasi dan diidentifikasi Akibat Bencana					5 Dokumen			5 Dokumen	
2	Jumlah Arsip yang mendapat pemulhan dan penyimpanan Akibat Bencana					5 Dokumen			5 Dokumen	
Jumlah Arsip Perangkat Daerah Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan						2 SKPD/UKPD	10 Dokumen		2 SKPD/UKPD	10 Dokumen
1	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Penggabungan Perangkat Kota Makassar					2 SKPD/UKPD	3 Dokumen		2 SKPD/UKPD	3 Dokumen
2	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Pembubaran Perangkat Kota Makassar						3 Dokumen			3 Dokumen
3	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan yang mendapat pendampingan						2 Dokumen			2 Dokumen
4	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Kelurahan yang mendapat pendampingan						1 Dokumen			1 Dokumen
Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentifikasi						5 Dokumen	14 Dokumen		5 Dokumen	14 Dokumen
	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					5 Dokumen	2 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen
	Jumlah Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						12 Dokumen			12 Dokumen
Jumlah Arsip Statis Kota Kota Makassar yang Dinyatakan Hilang yang dilakukan pencarian							5 Dokumen			5 Dokumen
1	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat penilaian dan penetapan						2 Dokumen			2 Dokumen
2	Jumlah Hasil Alih Media Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat evaluasi dan penetapan						2 Dokumen			2 Dokumen
3	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan dan diumumkan						1 Dokumen			1 Dokumen
4	Persentase Perijinan Penggunaan Arsip yang Diterbitkan						100%			100%

	Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang Mendapat Pelayanan Izin						1 Sop, 12 Dokumen				1 Sop, 12 Dokumen	
1	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan						1 SOP				1 SOP	
2	Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang mendapat penetapan daftar dan penetapan izin						12 Dokumen				12 Dokumen	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

Pelayanan kearsipan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Perda Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun sejauh ini masih diperlukan adanya pembinaan-pembinaan kearsipan baik SKPD/UKPD, sekolah maupun kelurahan.

2.3.2 Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Kearsipan Kota Makassar adalah :

2.3.2.1 Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Agar pelayanan dapat berjalan maksimal, SDM merupakan faktor penting selain sarana dan prasarana. SDM yang diperlukan Dinas Kearsipan Kota Makassar meliputi tenaga fungsional (Arsiparis) dan tenaga teknis (tenaga non fungsional yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi kearsipan). Secara umum SDM yang ada di Dinas Kearsipan Kota Makassar untuk tenaga fungsional Arsiparis sudah memadai dan untuk di masing-masing SKPD/UKPD masih kurang tenaga fungsional Arsiparis.

2.3.2.2 Keterbatasan Sarana dan prasarana Kearsipan.

Tersedianya sarana dan prasarana sangat mendukung Pelayanan kearsipan dimana sangat dibutuhkan ruang pelayanan, ruang staf, ruang restorasi arsip, ruang untuk pemilahan arsip (akusisi) sehingga dibutuhkan ruang yang memadai, mengingat jumlah arsip yang banyak dan kondisi arsip yang sudah tua dan berdebu sehingga di perlukan perlakuan yang khusus dalam pemeliharaan. Dukungan **prasarana** kearsipan untuk mempermudah dalam penyimpanan, pencarian dan penghematan ruang.

2.3.2.3 Belum Tersedianya Gedung Depot Arsip yang Repräsentatif atau sesuai dengan standar kearsipan untuk menyimpan arsip dimana harus luas karena setiap tahun arsip itu bertambah sehingga dalam pelaksanaan akusisi seharusnya arsip statis yang telah diakusisi tidak dikembalikan melainkan disimpan dalam khasana arsip daerah tetapi karena kurangnya tempat penyimpanan sehingga arsip tersebut dikembalikan ke SKPD yang bersangkutan.

- 2.3.2.4 Rendahnya pemahaman aparatatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan. Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan kearsipan mengakibatkan banyak arsip-arsip tercecer, hilang dan tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu para pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dipandang perlu memahami tata kelola arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kaidah kearsipan yang telah ditetapkan, sehingga arsip yang di ciptakan berguna bagi kepentingan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- 2.3.2.5 Pengembangan layanan jaringan kearsipan dalam memberikan informasi kepada masyarakat SKPD belum ada.
- 2.3.2.6 Kurangnya partisipasi dari pihak SKPD dalam mengirim/menyerahkan arsip statis untuk disimpan di Dinas Kearsipan Kota Makassar
- 2.3.2.7 Kurangnya koleksi arsip sejarah/ vital yang merupakan sumber permasalahan Dinas Kearsipan daerah, dikarenakan untuk pengadaan arsip vital memerlukan biaya yang cukup tinggi seperti arsip sebelum kemerdekaan, arsip perjuangan kemerdekaan, arsip sesudah kemerdekaan, arsip orde lama dan arsip orde baru.
- 2.3.2.8 Keterbatasan anggaran yang tersedia. Dinas Kearsipan Kota Makassar selalu mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana Kearsipan selalu dimasukan dalam pembuatan rencana anggaran dan kegiatan setiap tahun, namun keterbatasan anggaran yang harus dibagi dengan kegiatan SKPD lainnya. Menyebabkan pembelian sarana dan prasarana tersebut tidak bias direalisasikan.
- 2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional dan internasional
- Bahwa Dinas Kearsipan Kota Makassar dalam upaya menumbuhkan kesadaran bahwa peranan arsip sangatlah penting dan harus disadari di dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari tidak akan lancar bila tidak ada arsip. Arsip ini dapat membantu untuk pencapaian tujuan, sasaran yang akan dicapai, bila kesadaran telah tumbuh diharapkan terciptalah tertib arsip di setiap aparatatur pemerintahan daerah.
 - Bahwa Dinas Kearsipan Kota Makassar diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi kearsipan sebagai acuan, referensi ataupun bukti kinerja

khususnya pada lingkup Pemerintah Kota Makassar, dengan melaksanakan administrasi kearsipan secara baku.

- Bahwa Dinas Kearsipan Kota Makassar, dalam melaksanakan atau memberikan Pelayanan Kearsipan secara baik perlu didukung dengan System Informasi Manajemen Data Elektronik yang baik sesuai dengan perkembangan Informasi Teknologi.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Dalam rangka pelayanan kearsipan dengan semakin luasnya sasaran pelayanan kearsipan maka dengan sendirinya diperlukan adanya peningkatan SDM di bidang kearsipan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya dan diperlukannya pengelolaan kearsipan yang lebih baik serta diperlukan adanya peningkatan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- Belum memiliki depot arsip yang presentatif sehingga arsip yang di akusisi harus dikembalikan ke SKPD mereka kembali dikarenakan ruang depot tidak bisa menampung volume arsip dari SKPD lain.
- Rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip oleh lembaga-lembaga daerah, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan akan membawa dampak buruk pada system penataan dan penyimpanan arsip daerah;
- Rendahnya kesadaran lembaga-lembaga daerah, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan dalam menyerahkan arsip statisnya kepada arsip daerah;
- Dukungan pemerintah daerah masih kecil terhadap pengembangan kearsipan hal ini ditandai dengan dukungan anggaran yang belum memadai terhadap kearsipan daerah mengingat pentingnya fungsi Dinas Kearsipan Kota Makassar sebagai Lembaga Kearsipan Daerah;
- Belum semua SKPD/Unit kerja mempunyai unit kearsipan yang berfungsi mengelola arsip sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. Dimana dalam proses perencanaan amat diperlukan informasi berupa data-data yang dapat dijadikan bahan didalam merancang perencanaan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Kearsipan dalam pencapaian antara lain :

- Adanya Peraturan Perundang-Undangan menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di Kota Makassar.
- Semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi data terutama pemenuhan hak keperdataan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dengan didukung system informasi kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terus menerus dan berkesinambungan.
- Dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik dan reliable;
- Segala bentuk peristiwa dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi seluruh penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membuka peluang untuk meluruskan sejarah Kota dengan lebih obyektif dan komprehensif melalui informasi yang terekam dalam arsip;
- Kasus pengalihan aset Pemerintah Daerah kepihak non pemda memberikan bukti perlunya penanganan dan pengolahan arsip aset Pemerintah Daerah yang serius dan benar sangat diperlukan arsip sebagai alat bukti yang sah;
- Semakin meningkatnya sadar arsip masyarakat dan jasa kearsipan dalam usaha penyelamatan dan penyimpanan arsip pada instansi pemerintah serta swasta di Kota Makassar memberikan peluang peningkatan pendapatan daerah melalui Retribusi kearsipan daerah.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Diperlukan langkah-langkah yang berkesinambungan untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan dan sosialisasi setiap kebijakan baru dibidang kearsipan serta tetap mengupayakan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan secara berkala juga di upayakan pemenuhan tenaga fungsional Arsiparis serta tenaga pengelola kearsipan.

Dengan tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD terkait, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk urusan kearsipan dalam rangka pencapaian pelaksanaan program-program baik program-program pusat maupun program-program daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Makassar RKPd merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPd memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kewajiban daerah untuk menyusun RKPd sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan/perundangan. Poses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kearsipan Kota Makassar.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kearsipan Kota Makassar terhadap Analisis gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar, Aspek Geografis serta Demografi, Indikator Kinerja, Evaluasi Program dan Kegiatan RKPd sampai tahun berjalan 2020 dan Realisasi RPJMD terhadap evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan 2019, Pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja, permasalahan, peluang, isu strategis, maka skala prioritas kebutuhan proyeksi tahun 2021 dan 2022 terhadap program dan kegiatan Dinas Kearsipan Kota Makassar, maka untuk tahun 2021 program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan ini Dinas Kearsipan Kota Makassar melaksanakan 4 program (13 kegiatan), terdiri dari 1 (satu) program penunjang/pendukung (4 kegiatan dan 65 sub kegiatan) dan 3 (dua) program utama (9 kegiatan dan 21 sub kegiatan).

Adapun Alasan atau tujuan RKPd terhadap Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan Kota Makassar, sebagai berikut :

1. Pedoman bagi Dinas Kearsipan Kota Makassar dalam Penyusunan RKA setelah Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Tahun 2022;

3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD;
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ataupun evaluasi program dan kegiatan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD Dinas Kearsipan Kota Makassar, berdasarkan rancangan awal RKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran untuk Dinas Kearsipan pada tahun 2022 mengacu pada dokumen RKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Berikut Tabel. 2.4 Review terhadap rancangan awal Dinas Kearsipan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA MAKASSAR

SKPD: DINAS KEARSIPAN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	23.927.874.664	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	9.034.842.664	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%		
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%		
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasita	90%				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasita	90%		
2.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	154.634.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	156.025.000	

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	59.464.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	60.464.000
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	14.485.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	14.585.000
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	13.562.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	13.562.000
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	12.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	12.400.000
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	12.163.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	12.263.000
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	12.809.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	12.900.000
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	29.851.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	29.851.000
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	5 Dokumen	6.046.417.664	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	5 Dokumen	6.146.457.664
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Makassar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	45 Orang	5.751.666.664	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Makassar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	45 Orang	5.851.666.664
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Makassar	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	15 Orang	216.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Makassar	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	15 Orang	216.000.000

2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan	12 Bulan	78.751.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan	12 Bulan	78.791.000	
2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	12 Bulan	5.695.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	12 Bulan	5.715.000	
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	3.396.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	3.410.000	
2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Makassar	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola	1 Laporan	6.800.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Makassar	Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola	1 Laporan	6.900.000	
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	12 Bulan	4.990.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	12 Bulan	5.090.000	
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	24.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	24.320.000	
2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	5.140.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	5.260.000	
2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang disediakan	12 Bulan	12.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang disediakan	12 Bulan	12.000.000	
2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	3.050.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	3.150.000	

2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	12 Bulan	3.810.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	12 Bulan	3.910.000
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah kebutuhan pengadaan pakaian kerja dan peningkatan kapasitas SDM	75 Orang	265.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah kebutuhan pengadaan pakaian kerja dan peningkatan kapasitas SDM	75 Orang	266.500.000
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Makassar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya yang diadakan	50 Stel	68.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Makassar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya yang diadakan	50 Stel	69.000.000
2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	20 Orang	160.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	20 Orang	160.000.000
2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Makassar	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	37.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Makassar	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	37.500.000
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	10 Jenis	797.237.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	10 Jenis	798.837.750
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Komponen	10.161.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Komponen	10.261.250
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Jenis	104.818.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Jenis	105.818.000
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Makassar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis	15.385.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Makassar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis	15.385.000
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	89.694.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	89.694.000
2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Makassar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	37.636.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Makassar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	37.636.000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Makassar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 media cetak	10.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Makassar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 media cetak	10.560.000
2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Makassar	Jumlah Tamu yang Mendapatkan Fasilitas	200 Orang	22.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Makassar	Jumlah Tamu yang Mendapatkan Fasilitas	200 Orang	22.500.000
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	29 Kali	279.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	29 Kali	279.000.000
2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang ditata	5 Jenis	176.383.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang ditata	5 Jenis	176.383.500
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	10 Orang	51.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	10 Orang	51.600.000
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	68 Unit	15.880.901.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	68 Unit	881.901.500
2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Makassar	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	280.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Makassar	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	280.000.000
2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Makassar	Jumlah Mebel yang diadakan	7 Unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Makassar	Jumlah Mebel yang diadakan	7 Unit	30.000.000
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	40 Unit	475.901.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	40 Unit	475.901.500
2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	15.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	15.000.000.000
2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit	50.000.000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	4 Unit	45.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	4 Unit	46.000.000
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	4 Jenis	19.940.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	4 Jenis	20.440.000
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	25 Surat	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	25 Surat	2.500.000
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Jenis	17.940.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Jenis	17.940.000
2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	4 Orang	91.627.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	4 Orang	91.627.200
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan Pemeliharaan	55 Unit	682.989.650	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Makassar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan Pemeliharaan	55 Unit	683.989.650
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	52.836.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	52.836.800
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	18 Unit	344.712.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kec. Makassar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	18 Unit	345.712.850

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	33 Unit	27.440.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	33 Unit	27.440.000	
2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kec. Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan	1 Aplikasi	50.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kec. Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan	1 Aplikasi	50.000.000	
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit	190.000.000	
2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit	18.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit	18.000.000	
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Makassar	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	5070 (74,1%)	427.935.400	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Makassar	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	5070 (74,1%)	401.370.000	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	60,78% (31 SKPD)				Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	60,78% (31 SKPD)		
			Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	31 Orang				Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	31 Orang		

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip Kota Makassar yang dikelola	100 dokumen dan 100 Box	82.761.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip Kota Makassar yang dikelola	100 dokumen dan 100 Box	82.761.000
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Makassar	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan digunakan	10 Orang	39.114.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Makassar	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan digunakan	10 Orang	39.114.000
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Makassar	Jumlah Arsip Dinamis yang mendapatkan pemeliharaan dan penyusutan	1 Kegiatan	8.982.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Makassar	Jumlah Arsip Dinamis yang mendapatkan pemeliharaan dan penyusutan	1 Kegiatan	8.982.000
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Kota Makassar	Jumlah SKPD yang diawasi	5 SKPD	34.665.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Kota Makassar	Jumlah SKPD yang diawasi	5 SKPD	34.665.000
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip Statis Kota Makasar yang dikelola	2 dokumen dan 125 box	291.029.400	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip Statis Kota Makasar yang dikelola	2 dokumen dan 125 box	291.350.000
02.02.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Makassar	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan Kepada ANRI	2 Dokumen	9.326.000	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Makassar	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan Kepada ANRI	2 Dokumen	9.326.000
02.02.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Makassar	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses	125 Box	281.703.400	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Makassar	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses	125 Box	282.024.000
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar yang dikelola	2 SKPD	54.145.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar yang dikelola	2 SKPD	27.259.000
02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Melalui JIKN	Kota Makassar	Jumlah Layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN yang mendapat Penyediaan Informasi dan Akses	2 Dokumen	6.791.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Melalui JIKN	Kota Makassar	Jumlah Layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN yang mendapat Penyediaan Informasi dan Akses	2 Dokumen	6.695.000

02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kota Makassar	Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas	2 SKPD	47.354.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kota Makassar	Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas	2 SKPD	20.564.000
03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Makassar	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1141 (Box Arsip Statis)	720.681.800	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Makassar	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1141 (Box Arsip Statis)	720.681.800
03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Makassar	Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	20 Dokumen	97.702.000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Makassar	Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	20 Dokumen	97.702.000
03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Makassar	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang mendapat penilaian dan pemusnahan	10 Dokumen	89.792.000	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Makassar	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang mendapat penilaian dan pemusnahan	10 Dokumen	89.792.000
03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Makassar	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dilaksanakan	10 Dokumen	7.910.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Makassar	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dilaksanakan	10 Dokumen	7.910.000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	20 Dokumen	37.704.000	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	20 Dokumen	37.704.000
03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang dievaluasi dan diidentifikasi Akibat Bencana	10 Dokumen	19.152.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang dievaluasi dan diidentifikasi Akibat Bencana	10 Dokumen	19.152.000
03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang mendapat pemulihan dan penyimpanan Akibat Bencana	10 Dokumen	18.552.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang mendapat pemulihan dan penyimpanan Akibat Bencana	10 Dokumen	18.552.000
03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Makassar	Jumlah Arsip Perangkat Daerah Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan	40 Dokumen	45.302.000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Makassar	Jumlah Arsip Perangkat Daerah Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan	40 Dokumen	45.302.000
03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Penggabungan Perangkat Kota Makassar	10 Dokumen	9.426.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Penggabungan Perangkat Kota Makassar	10 Dokumen	9.426.000
03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Pembubaran Perangkat Kota Makassar	10 Dokumen	8.969.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Pembubaran Perangkat Kota Makassar	10 Dokumen	8.969.000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Makassar	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan yang mendapat pendampingan	10 Dokumen	8.969.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Makassar	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan yang mendapat pendampingan	10 Dokumen	8.969.000
03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Makassar	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Kelurahan yang mendapat pendampingan	10 Dokumen	17.938.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Makassar	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Kelurahan yang mendapat pendampingan	10 Dokumen	17.938.000
03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentifikasi	40 Dokumen	368.022.800	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentifikasi	40 Dokumen	368.022.800
03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Makassar	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20 Dokumen	89.126.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Makassar	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20 Dokumen	89.126.000
03.2.04.02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Makassar	Jumlah Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20 Dokumen	278.896.800	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Makassar	Jumlah Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20 Dokumen	278.896.800
03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah Arsip Statis Kota Makassar yang Dinyatakan Hilang yang dilakukan pencarian	9 Dokumen	171.951.000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah Arsip Statis Kota Makassar yang Dinyatakan Hilang yang dilakukan pencarian	9 Dokumen	171.951.000
03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat penilaian dan penetapan	3 Dokumen	154.884.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat penilaian dan penetapan	3 Dokumen	154.884.000

03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah Hasil Alih Media Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat evaluasi dan penetapan	3 Dokumen	8.892.000	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah Hasil Alih Media Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat evaluasi dan penetapan	3 Dokumen	8.892.000
03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Makassar	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan dan diumumkan	3 Dokumen	8.175.000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Makassar	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan dan diumumkan	3 Dokumen	8.175.000
04	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Makassar	Persentase Perijinan Penggunaan Arsip yang Diterbitkan	100%	186.700.900	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Makassar	Persentase Perijinan Penggunaan Arsip yang Diterbitkan	100%	136.700.900
04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin	1 SOP dan 12 dokumen	186.700.900	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin	12 Dokumen	136.700.900
04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Makassar	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan	1 SOP	50.000.000	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Makassar	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan		
04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Makassar	Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang mendapat penetapan daftar dan penetapan izin	12 Dokumen	136.700.900	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Makassar	Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang mendapat penetapan daftar dan penetapan izin	12 Dokumen	136.700.900

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan musrenbang yang terkait dengan usulan Dinas Kearsipan Kota Makassar di dalam rancangan Renja Dinas Kearsipan Kota Makassar.

Dari hasil Forum SKPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD.

Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD dan Forum SKPD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program satu tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RKPD adalah Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan daerah (Peningkatan kapasitas pengarsipan SKPD). Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Arsip;
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
4. Program Perijinan Penggunaan Arsip.

Adapun usulan program/kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, masyarakat, LSM maupun usulan dari musrenbang untuk Dinas Kearsipan pada tahun 2022 tidak ada usulan dapat dilihat pada table 2.5

TABEL 2.5
KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2022
KOTA MAKASSAR

SKPD: Dinas Kearsipan

No	Program / Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan *)
		Lokasi	Pengusul			
1	2	3	4	5	6	7
			NIHIL			

Keterangan

Data diperoleh dari SIPD Kota Makassar (<http://www.sipd.kemendagri.go.id>) pada SIV Musrenbang. Usulan Musrenbang yang diakomodir oleh SKPD di Tingkat Musrenbang Kota, secara otomatis menjadi Data Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2022

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Kebijakan dimaksud merupakan perencanaan pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPN 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020 – 2024 yaitu salah satunya pembangunan di bidang aparatur negara dengan strategi “Penguatan implelementasi manajemen kearsipan” dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan ketersediaan informasi kearsipan yang autentik dan utuh guna mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan Negara dan simpul pemersatu bangsa.
2. Peningkatan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.
3. Peningkatan keselamatan dan keterlindungan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.
4. Peningkatan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan pemerintah.

Agenda strategi aspek manajemen kearsipan dalam RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan, sarana dan prasarana, serta fungsi kelembagaan kearsipan khususnya di daerah;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kearsipan;
3. Meningkatkan kekayaan informasi/konten kearsipan dalam jaringan kearsipan nasional (SIKN-JIKN)
4. Meningkatkan implementasi sistem pengelolaan arsip terintegrasi berbasis TIK dan kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan (knowledge management) dengan Big Data Kearsipan
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam agenda prioritas ke4 adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan; meningkatkannya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintahan; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintahan.

Arah kebijakan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, melalui strategi :

1. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
2. Pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional

Prioritas pembangunan “Pengolahan system dan jaringan informasi kearsipan nasional sebagai proritas nasional dengan kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan system dan jaringan kearsipan nasional (SIKN dan JIKN);
- b. Implementasi system informasi kearsipan dinamis (SIKD) – TIK di Instansi Pusat (K/L) BUMN dan Perguruan Tinggi Negeri;
- c. Kemampuan teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan peraturan perundangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Arah Kebijakan pembangunan kearsipan adalah pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dengan penguatan system kearsipan berbasis TIK dan pengelolaan system jaringan informasi kearsipan nasional dengan penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022, prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2022 dalam mendukung 5 (lima) arahan presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang perlu dilakukan salah satu dari 7 agenda pembangunan tersebut untuk Dinas Kearsipan terdapat pada point 7 yaitu “ Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik”. Dimana negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui program reformasi birokrasi dan tata kelola dengan kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja yaitu dengan penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintahan yang mana arah kebijakan pembangunan

bidang urusan kearsipan dengan kinerjanya yaitu terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal.

Arah kebijakan yang ditempuh dan terkait dengan fokus peningkatan pelayanan kearsipan adalah : Melaksanakan layanan kearsipan berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan mempergunakan system komputerisasi dan internet. Melaksanakan layanan kepada masyarakat terutama untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Layanan kearsipan melalui jasa teknis kearsipan seperti pembinaan, pengelolaan kearsipan, penyimpanan arsip dan peminjaman arsip.

Arah kebijakan yang di tempuh dan terkait dengan fokus peningkatan pembinaan kearsipan adalah : Melaksanakan pembinaan kearsipan di Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Makassar, dalam pembinaan tentang pemilahan, penyimpanan dan pemberkasan arsip.

Arah Kebijakan yang ditempuh dan terkait dengan fokus peningkatan pelestarian kearsipan adalah : melestarikan arsip dinamis dan statis. Pelestarian arsip melalui fumigasi dan pemilahan, penyimpanan serta pemberkasan. Melestarikan arsip melalui restorasi dan konservasi arsip.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat capai.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas;
2. Terwujudnya pengelolaan arsip secara baku dalam rangka meningkatkan ketersediaan arsip;
3. Terwujudnya perlindungan dan penyelamatan arsip sehingga meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip;
4. Terwujudnya perijinan pelayanan penggunaan arsip.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tidakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai. Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas dan yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun ke depan maka Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah;
3. Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip;
4. Meningkatnya perijinan pelayanan penggunaan arsip.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran di tahun 2022 ini mengacu pada indikator yang diukur sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama Dinas Kearsipan Kota Makassar yang mengacu pada sasaran untuk tahun 2022 adalah :

No.	Sasaran	Indikator	Target 2022
1.	Meningkatnya sumber daya kearsipan uang berdaya guna dan berhasil guna	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	5070 (74,1%)
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	60,78% (31 SKPD)
		Peningkatan SDM Pengelola Arsip	31 Orang
2.	Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	1151 (box arsip statis)
3.	Termanfaatkannya sistem informasi kearsipan dan pengembangan portal kearsipan antar SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar serta digitalisasi arsip melalui aplikasi SRIKAMNDI	Persentase Perijinan Penggunaan Arsip Yang Diterbitkan	100%

2. Indikator kinerja penunjang Dinas Kearsipan Kota Makassar yang mengacu pada sasaran untuk Tahun 2022 adalah :

No.	Sasaran	Indikator	Target 2022
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran, keuangan,	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja	100%

	kepegawaian dan umum	Perangkat Daerah	90%
		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang di tentukan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan dan telaahan terhadap kebijakan nasional, maka Dinas Kearsipan Kota Makassar untuk tahun 2022 merumuskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan diusulkannya program/kegiatan tersebut adalah :

1. Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Pencapaian MDGs,
3. Pencapaian IKK
4. Adanya program/kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan,
5. Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang,
6. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana,
7. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan,
8. Arsip belum terpola dalam suatu system informasi
9. Perlindungan, Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip penting yang bernilai guna tinggi yang berada pada lembaga/instansi daerah sebagai bukti sejarah, pertanggungjawaban dan sebagai bahan penelitian bagi generasi mendatang, sehingga menjamin bahwa arsip dapat member manfaat bagi masyarakat luas.
10. Mengembangkan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kearsipan Kota Makassar terhadap Analisis gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar, Aspek Geografis serta Demografi, Indikator Kinerja, Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan 2021 dan Realisasi RPJMD terhadap evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan 2020, Pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja, permasalahan, peluang, isu strategis, maka skala prioritas kebutuhan proyeksi tahun

2022 dan 2023 terhadap program dan kegiatan Dinas Kearsipan Kota Makassar, maka untuk tahun 2022 program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan ini Dinas Kearsipan Kota Makassar melaksanakan 4 program (13 kegiatan), terdiri dari 1 (satu) program penunjang/pendukung (8 kegiatan dan 68 sub kegiatan) dan 3 (dua) program utama (9 kegiatan dan 21 sub kegiatan) yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 1.1.7 Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- 1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

- 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 1.3.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;

- 1.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 1.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.4.3 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - 1.4.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 1.4.5 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 1.4.6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 - 1.4.7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 - 1.4.8 Pemindahan Tugas ASN;
 - 1.4.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 1.4.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1.4.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material;
 - 1.5.8 Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 1.5.9 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 1.5.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.5.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.6.3 Pengadaan Alat Besar;
 - 1.6.4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - 1.6.5 Pengadaan Mebel;

- 1.6.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.6.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
- 1.6.8 Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 1.6.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.6.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.6.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - 1.8.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - 1.8.5 Pemeliharaan Mebel;
 - 1.8.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.8.7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - 1.8.8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - 1.8.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 1.8.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 1.8.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 1.8.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

2. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah sesuai kaidah-kaidah kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan program pengelolaan arsip adalah memelihara arsip dengan baik, menyimpan arsip dengan sistem yang tepat sehingga mudah di temukan kembali secara tepat dan cepat, menyiapkan tempat penyimpanan yang memadai serta menjamin keselamatan arsip yang baik isinya maupun bentuknya, sehingga dapat terjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip yang dikelola. Kegiatan yang mendukung program pengelolaan arsip adalah sebagai berikut :

2.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

- 2.1.1 Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis;
- 2.1.2 Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;
- 2.1.3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

- 2.2.1 Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI;
- 2.2.2 Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis;

2.3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

- 2.3.1 Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN;
- 2.3.2 Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota;

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan dan penyelamatan arsip bertujuan untuk melindungi dan penyelamatan arsip baik fisik maupun informasi, yang berasal dari SKPD, BUMD, Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang serta meningkatkan mutu layanan dan arus informasi kearsipan dari dan untuk masyarakat. Perlindungan dan penyelamatan arsip dilakukan untuk mengatur dan menata arsip secara sistematis, aspek nilai kegunaan, bentuk dan sifat arsip, pemeliharaan dan perawatan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas organisasi.

Perlindungan arsip adalah suatu kegiatan untuk melindungi, mengamankan dan menyelamatkan serta memulihkan arsip dari kerusakan, hilang atau musnah baik secara fisik maupun informasi yang terkandung di dalam dokumen/arsip khususnya arsip yang karena sifatnya harus dirahasiakan maka harus diatur melalui prosedur yang tepat. Perlindungan dokumen/arsip dapat dilakukan dengan cara : penggandaan (duplication), pemencaran (dispersal), menggunakan peralatan penyimpanan khusus (vaulting) yang aman.

Kegiatan yang mendukung Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah sebagai berikut :

3.1 Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, dengan sub kegiatan yaitu:

- 3.1.1 Penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
- 3.1.2 Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun.

3.2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

- 2.2.1 Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana;
- 2.2.2 Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana.

3.3 Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabungkan dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan sub kegiatan yaitu :

- 3.3.1 Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penterahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota;
- 3.3.2 Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penterahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- 3.3.3 Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan;
- 3.3.4 Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan.

3.4 Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

- 3.4.1 Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;

3.4.2 Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip.

3.5 Pencarian arsip statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang, dengan sub kegiatan yaitu :

3.5.1 Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang;

3.5.2 Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang;

3.5.3 Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA).

4. Program Perijinan Penggunaan Arsip

Program perijinan penggunaan arsip bertujuan untuk menjamin kemudahan akses arsip bagi pengguna arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.

Kegiatan yang mendukung program perijinan penggunaan arsip adalah sebagai berikut :

4.1 Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

2.1.1 Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup;

2.1.2 Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Dari uraian tersebut diatas secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2022 pada Dinas Kearsipan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									7,120,387,908			9,146,240,500
2.24.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5,951,216,708			8,012,192,500
2.24.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									173,926,000			230,331,000
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	2 Dokumen	100 Persen	49,173,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	52,520,000
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	1 Dokumen	100 Persen	11,293,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	18,240,000
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	1 Dokumen	100 Persen	11,452,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	12,089,000
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	1 Dokumen	100 Persen	11,875,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja	100 %	13,417,000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
															Perangkat Daerah			
2	24	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	1 Dokumen	100 Persen	11,086,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	13.578.000
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	3 Dokumen	100 Persen	57,917,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	99.577.000
2	24	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	2 Dokumen	100 Persen	20,130,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	20.930.000
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,504,555,213				6,354,431,388	
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	35 Orang	100 Persen	4,241,635,213	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.088.921.388
2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	14 Orang	100 Persen	179,380,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan	100 %	181.119.000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
												laporan kinerja Perangkat Daerah		
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang disediakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar, Makassar, Macin	100 %	12 Bulan	100 Persen	77,368,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	80,119,000
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar, Makassar, Macin	100 %	12 Bulan	100 Persen	2,272,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,272,000
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								213,500,000					230,750,000
2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Pengadaan Pakan Dinas Beserta Perengkapannya yang diadakan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Macin	90 %	50 Stel	90 Persen	37,500,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	39,750,000
2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Macin	90 %	16 Orang	90 Persen	176,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	191,000,000
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								255,201,945					323,474,837
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Komponen Instalasi	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang	Kota Makassar,	90 %	4 Jenis	90 Persen	5,881,250	Pendapatan Pajak		Persentase sarana dan	90 %	5,881,250

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Bangunan Kantor	dalam kondisi baik	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	disediakan	Makassar, Maccini				Daerah		prasarana aparatur dalam kondisi baik			
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	4 Jenis	90 Persen	46,645,295	Pendapat an Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	46,645,187
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	9 Jenis	90 Persen	9,805,000	Pendapat an Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	6,308,000
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	2 Jenis	90 Persen	43,538,400	Pendapat an Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	50,128,400
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	8 Jenis	90 Persen	29,092,000	Pendapat an Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	22,012,000
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	4 Media Cetak	90 Persen	9,840,000	Pendapat an Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	40,000,000
2	24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Tamu yang Mendapatkan Fasilitas	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	120 Orang	90 Persen	6,400,000	Pendapat an Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	9,500,000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Terpenuhi Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	11 Kali	90 Persen	104,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	143,000,000
2.24.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhi Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Bulan	90 Persen	0	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	0
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								183,487,000				214,328,125	
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Terpenuhi Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Macdini	90 %	8 Unit	100 Persen	133,487,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	164,328,125
2.24.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Aset Tak Berwujud yg diadakan	Terpenuhi Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Macdini	90 %	1 Aplikasi	100 Persen	50,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	50,000,000
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								349,600,000				264,540,000	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Kota Makassar, Makassar, Macdini	90 %	1 Jenis	12 Bulan	12,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	13,140,000
2.24.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Kota Makassar, Makassar, Macdini	90 %	4 Jenis	12 Bulan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam	90 %	0

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolek Ukur	Target	
																kondisi baik		
2.24	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	12 Bulan	12 Bulan	337,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	251,400,000
2.24	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								273,946,550				394,247,150	
2.24	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Unit	12 Bulan	40,150,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	41,747,300
2.24	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Unit	12 Bulan	95,586,550	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	213,209,850
2.24	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan	Persentase sarana dan	Jumlah Peralatan dan	Terpeliharanya Barang	Kota	90 %	11 Unit	12 Bulan	21,230,000	Pendapat		Persentase	90 %	22,690,000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					dan Mesin Lainnya	prasarana aparatur dalam kondisi baik	Mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Milik Daerah	Makassar, Makassar, Maccini					an Pajak Daerah		sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
2.24	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Unit	12 Bulan	95,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 95,000,000	
2.24	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Unit	12 Bulan	18,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 21,600,000	
2.24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							405,454,400				420,489,000		
2.24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							77,612,000				79,005,600		
2.24	02	2.01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan	Terpeliharanya Dokumen Arsip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.78 (31 SKPD) %	10 Dokumen	100 %	35,202,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	60.78 (31 SKPD) % 35,358,600	
2.24	02	2.01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah arsip dinamis yang mendapatkan pemeliharaan dan penyusutan	Terpeliharanya Dokumen Arsip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.78 (31 SKPD) %	1 Kegiatan	100 %	8,187,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	60.78 (31 SKPD) % 8,982,000	
2.24	02	2.01	03		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah SKPD yang diawasi	Terpeliharanya Dokumen Arsip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	60.78 (31 SKPD) %	5 SKPD	100 %	34,123,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	60.78 (31 SKPD) % 34,665,000	

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
					Semua Kelurahan							Secara Baku		
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								280,898,400					281,930,400
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Jumlah salinan Otentik Naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	Terpeliharanya Arsip Statis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.1 %	2 Dokumen	100 %	5,626,000	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	74.1 %	6,326,000
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terpeliharanya Arsip Statis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.1 %	150 Box	100 %	275,271,400	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	74.1 %	275,604,400
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								46,944,000					59,561,000
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Peningkatan SOM Pengelola Kearsipan	Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas	Terpeliharanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Orang	2 SKPD	2 SKPD	6,111,000	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	31 Orang	6,695,000
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah Layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN yang mendapat	Terpeliharanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	31 Orang	2 Dokumen	2 SKPD	40,833,000	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	31 Orang	52,868,000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
			Penyediaan Informasi dan Akses		Semua Kelurahan								
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							578,697,800				557,272,000
2.24.03.2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun							88,833,000				88,835,000
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang mendapatkan penilaian dan pemusnahan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Makassar, Macchini	1151 BOK	10 Dokumen	20 Dokumen	81,624,000	Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	1151 BOK	81,625,000
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dilaksanakan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Makassar, Macchini	1151 BOK	10 Dokumen	20 Dokumen	7,209,000	Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan,	1151 BOK	7,210,000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
 Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
															Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat			
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						34,812,000			34,238,000				
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Arsip yang Evakuasi dan Diidentifikasi Akibat Bencana	Terlindungnya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 BOK	10 Dokumen	20 Dokumen	17,658,000	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	1151 BOK	17,086,000
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Arsip yang Mendapat Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlindungnya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 BOK	10 Dokumen	20 Dokumen	17,154,000	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara,	1151 BOK	17,152,000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat				
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan										41,027,000				41,858,000			
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan bagi penggabungan Perangkat Kota Makassar	Terlindungnya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 BOK	10 Dokumen	40 Dokumen	8,687,000	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	1151 BOK	8,876,000				
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan bagi pembubaran Perangkat Kota Makassar	Terlindungnya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 BOK	10 Dokumen	40 Dokumen	7,999,000	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan	1151 BOK	8,269,000				

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
 Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
															Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat			
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan yang mendapatkan pendampingan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 B ox	10 Dokumen	40 Dokume n	9,211,000	Pendapat an Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjaw aban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	1151 B ox	8,238,000
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 B ox	10 Dokumen	40 Dokume n	16,130,000	Pendapat an Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjaw aban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan	1151 B ox	16,476,000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
Lokasi Output Kegiatan	Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target						
															Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat			
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota					280,733,800						276,708,000		
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	1151 B ox	20 Dokume n	40 Dokume n	111,151,000	Pendapat an Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjaw aban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	1151 B ox	107,491,000
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Alih Media yang dinilai ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	1151 B ox	20 Dokume n	40 Dokume n	169,582,800	Pendapat an Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjaw aban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk	1151 B ox	169,217,000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakirisan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Telok Ukur	Target	
															Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat			
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang										132,202,000				115,682,000			
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 Box	3 Dokumen	9 Dokumen	116,487,000	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	1151 Box	98,564,000				
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan	Jumlah Hasil Alih Media Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat evaluasi dan penetapan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 Box	3 Dokumen	9 Dokumen	8,112,000	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	1151 Box	8,892,000				

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Kesejahteraan Rakyat									Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat			
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan dan diumumkan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 B ox	3 Dokumen	9 Dokumen	7,503,000	Pendapat an Pajak Daerah		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	1151 B ox	8,176,000
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								185,109,000				176,387,000	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								185,109,000				176,387,000	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan	Terlayannya Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 SOP	100 %	50,000,000	Pendapat an Pajak Daerah		Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100 %	39,686,100
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan	Persentase Izin	Jumlah Penggunaan	Terlayannya Izin	Kota	100 %	12 Dokumen	100 %	135,109,000	Pendapat		Persentase Izin	100 %	136,700,900

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.24.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Arsip yang Bersifat Tertutup yang mendapat penetapan daftar dan penetapan Izin	penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kota Makassar	Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					an Pajak Daerah		Penggunaan Arsip yang diterbitkan			
TOTAL									7,120,387,907						9,166,260,500

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR

Rencana kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi Walikota Makassar. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan RENJA mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Untuk lebih jelas Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2022 akan disampaikan dalam table 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								7,120,387,908			
2	24	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,951,216,708			
2	24	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								171,926,000			
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	2 Dokumen	100 Persen	49,173,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	1 Dokumen	100 Persen	12,293,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	1 Dokumen	100 Persen	11,452,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	1 Dokumen	100 Persen	11,575,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	1 Dokumen	100 Persen	11,086,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan	Persentase	Jumlah dokumen	Tersedianya Dokumen	Kota	100 %	3 Dokumen	100 Persen	57,917,000	Pendapatan	

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar, Makassar, Maccini					Pajak Daerah		
2	24	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	2 Dokumen	100 Persen	20,130,000	Pendapatan Pajak Daerah		
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,501,555,213			
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	35 Orang	100 Persen	4,242,635,213	Pendapatan Pajak Daerah		
2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	14 Orang	100 Persen	179,280,000	Pendapatan Pajak Daerah		
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang disediakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	12 Bulan	100 Persen	77,358,000	Pendapatan Pajak Daerah		
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar, Makassar, Maccini	100 %	12 Bulan	100 Persen	2,272,000	Pendapatan Pajak Daerah		
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								213,500,000			
2	24	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	50 Stel	90 Persen	37,500,000	Pendapatan Pajak Daerah		
2	24	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN Perangkat Daerah yang	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat	Kota Makassar,	90 %	16 Orang	90 Persen	176,000,000	Pendapatan Pajak Daerah		

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					mendapat peningkatan kapasitas	berdasarkan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan	Daerah	Makassar, Maccini							
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							155,201,945			
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	4 Jenis	90 Persen	5,881,250	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	4 Jenis	90 Persen	46,645,295	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	9 Jenis	90 Persen	9,805,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	2 Jenis	90 Persen	43,538,400	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	8 Jenis	90 Persen	29,092,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	4 Media Cetak	90 Persen	9,840,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Tamu yang Mendapatkan Fasilitas	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	120 Orang	90 Persen	6,400,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase sarana dan	Jumlah rapat-rapat	Terpenuhinya Pelayanan	Kota	90 %	11 Kali	90 Persen	104,000,000	Pendapatan	

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					SKPD	prasarana aparatur dalam kondisi baik	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Administrasi Umum yang disediakan	Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Pajak Daerah	
2	24	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhi Pelayan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 Bulan	90 Persen	0	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								183,457,000		
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Terpenuhi Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	8 Unit	100 Persen	133,457,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Aset Tak Berwujud yg diadakan	Terpenuhi Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Aplikasi	100 Persen	50,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								349,600,000		
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Jenis	12 Bulan	12,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	4 Jenis	12 Bulan	0	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	12 Bulan	12 Bulan	337,600,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								273,946,550		

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Unit	12 Bulan	40,130,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Unit	12 Bulan	99,586,550	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	21 Unit	12 Bulan	21,230,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Unit	12 Bulan	95,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	90 %	1 Unit	12 Bulan	18,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								405,454,400			
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								77,612,000			
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan	Terpeliharanya Dokumen Asip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,78 (31 SKPD) %	10 Dokumen	100 %	35,202,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah arsip dinamis yang mendapatkan pemeliharaan dan penyusutan	Terpeliharanya Dokumen Asip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,78 (31 SKPD) %	1 Kegiatan	100 %	8,287,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah SKPD yang diawasi	Terpeliharanya Dokumen Asip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,78 (31 SKPD) %	5 SKPD	100 %	34,123,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								280,898,400			
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampahan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Jumlah salinan Otentik Naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	Terpeliharanya Arsip Statis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,1 %	2 Dokumen	100 %	5,616,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terpeliharanya Arsip Statis Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,1 %	150 Box	100 %	275,272,400	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								46,944,000			
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	Peningkatan SDM	Jumlah Unit Kearsipan	Terpeliharanya Simpul	Kota	31 Oran	2 SKPD	2 SKPD	6,111,000	Pendapatan	

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan													
					Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Pengelola Kearsipan	dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar	Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6				Pajak Daerah	
2	24	02	2.03	02	Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah Layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN yang mendapat Penyediaan Informasi dan Akses	Terpeliharanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Orang	2 Dokumen	2 SKPD	40,833,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								578,607,800		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun								88,833,000		
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang mendapatkan penilaian dan pemusnahan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	1151 Box	10 Dokumen	20 Dokumen	81,624,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dilaksanakan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	1151 Box	10 Dokumen	20 Dokumen	7,209,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								34,812,000		
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan identifikasi	Tingkat Keberadaan dan	Jumlah Arsip yang	Terlindunginya dan	Kota	1151 Box	10 Dokumen	20 Dokumen	17,658,000	Pendapatan	

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Arsip Akibat Bencana	Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Elevakuasi dan Diidentifikasi Akibat Bencana	Terselamatkannya Arsip Daerah	Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			n		Pajak Daerah	
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Arsip yang Mendapat Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 Box	10 Dokumen	10 Dokumen	17,154,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								42,027,000		
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan bagi penggabungan Perangkat Kota Makassar	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 Box	10 Dokumen	40 Dokumen	8,687,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan	Jumlah arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan bagi	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua	1151 Box	10 Dokumen	40 Dokumen	7,999,000	Pendapatan Pajak Daerah	

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan												
					Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	pembubaran Perangkat Kota Makassar			Kelurahan					
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan yang mendapatkan pendampingan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Box	10 Dokumen	40 Dokumen	9,211,000	Pendapatan Pajak Daerah
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Box	10 Dokumen	40 Dokumen	16,130,000	Pendapatan Pajak Daerah
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Ailh Media Kabupaten/Kota								280,733,800	
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan,	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Makassar, Maccini	151 Box	20 Dokumen	40 Dokumen	111,151,000	Pendapatan Pajak Daerah

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat									
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Alih Media yang dinilai ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Makassar, Macchini	1151 Box	20 Dokumen	40 Dokumen	169,582,800	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang								132,202,000		
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 Box	3 Dokumen	9 Dokumen	116,487,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Alih Media Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat evaluasi dan penetapan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1151 Box	3 Dokumen	9 Dokumen	8,212,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar	Tingkat Keberadaan dan	Jumlah Daftar Pencarian	Terlindunginya dan	Kota	1151 Box	3 Dokumen	9 Dokumen	7,503,000	Pendapatan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Pencarian Arsip (DPA)	Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Arsip (DPA) yang ditetapkan dan diumumkan	Terselamatkannya Arsip Daerah	Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Pajak Daerah	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								185,109,000		
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								185,109,000		
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan	Terlayannya Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 SOP	100 %	50,000,000	Pendapatan Pajak Daerah	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang mendapat penetapan daftar dan penetapan izin	Terlayannya Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kota Makassar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	135,109,000	Pendapatan Pajak Daerah	
TOTAL													7,120,387,907		

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan Kota Makassar melalui pengukuran kinerja yang merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan untuk melihat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, sasaran dan kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kearsipan Kota Makassar. Melalui pengukuran kinerja, maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan terlihat dari kemampuan sumber daya manusianya mencapai hasil yang maksimal. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka disisi lain yang sangat urgens/penting diperlukannya suatu pedoman atau Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan kearsipan daerah Kota Makassar dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan meliputi kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan Kota Makassar yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya yaitu anggaran yang memadai.

Pelaksanaan anggaran akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikator yang dialokasikan untuk Dinas Kearsipan Kota Makassar maka akan mengurangi jumlah kegiatan atau merasionalisasikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan Kota Makassar akan benar-benar menelaah kegiatan-kegiatan yang menjadi program prioritas utama dalam pencapaian target dan sasaran atau menampilkan semua kegiatan prioritas dengan mempercepat target.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kearsipan Kota Makassar disusun dengan harapan dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2022 dan dapat menjadi pertimbangan Tim anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Dinas Kearsipan Kota Makassar.

Makassar, 28 September 2021



Kepala Dinas Kearsipan
Kota Makassar

Dr. H. Fathurrahim, S.T., M.T

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19700310 199803 1 005